

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat menentukan dalam pembangunan bangsa, karena kemajuan suatu negara itu erat hubungannya dengan pendidikan. Oleh karena itu maka bangsa Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar dalam hal pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan, fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Yaitu untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu.¹

Proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat karena pendidikan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, dan pada dasarnya manusia yang terkumpul dalam masyarakat itu memerlukan pendidikan. Bagi manusia pendidikan merupakan pembentuk dasar watak manusia, tanpa pendidikan manusia tidak akan mungkin membentuk suatu peradaban yang baik. Jadi jelas sekali bahwa masyarakat punya andil besar terhadap pendidikan.

¹Umar Tirtarahardjo dan La Sula, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 187-188

Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Dari undang-undang di atas kiranya dapat memberi arti bahwa pendidikan merupakan syarat mutlak dalam pencapaian kemajuan dalam suatu masyarakat dan bangsa, untuk mencapai tujuan tersebut maka sangat diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak untuk saling mendukung, baik pemerintah maupun masyarakat.

Fungsi dan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan sebenarnya sejak lama berjalan di masyarakat, yang bisa kita buktikan dengan tumbuhnya dan beroperannya beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sehingga pada hakikatnya konsep Manajemen Pendidikan Berbasis masyarakat sudah lama diterapkan di masyarakat dan masyarakat banyak berperan aktif di dalamnya.

Dasar hukum utama pembentukan Komite Sekolah untuk pertama kalinya adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), rumusan Propenas tentang pembentukan Komite Sekolah kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan

²Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 7

Nasional No. 044/U/2002 yang merupakan acuan utama pembentukan Komite Sekolah.³

Komite sekolah merupakan sebuah konsep baru tentang wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yang tentunya merupakan suatu hal yang belum menjiwai dalam masyarakat kita. Namun pada hakikatnya ia sudah ada dalam realitas sebuah partisipasi masyarakat, tentunya yang dituntut adalah keikutsertaan dan rasa memiliki masyarakat terhadap wadah ini.

Komite sekolah merupakan suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Anggota-anggota komite sekolah terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru, orang tua siswa, dan masyarakat.⁴

Komite sekolah bertujuan untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan; meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; menciptakan kondisi transparan, akuntabel, demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

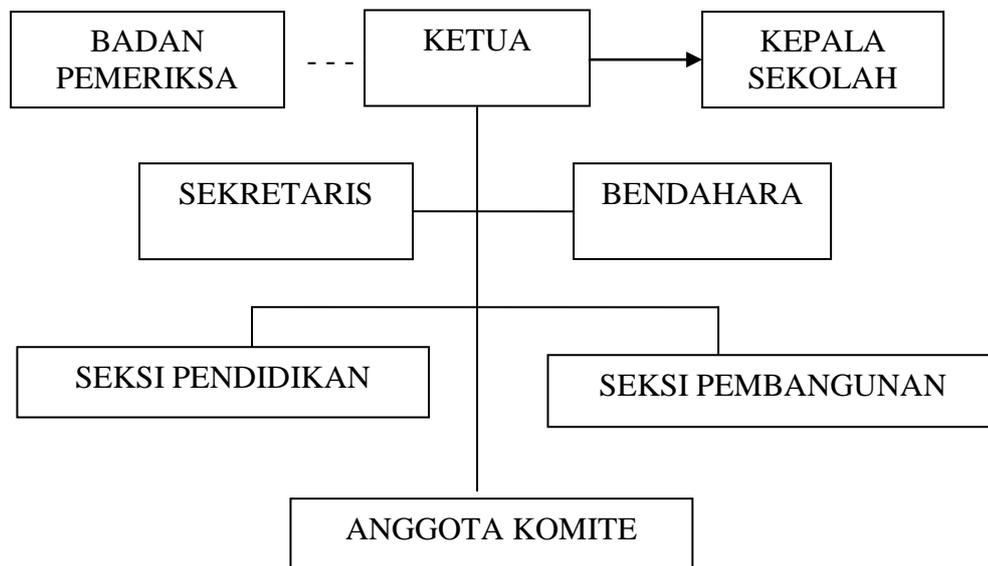
Struktur kepengurusan komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang

³Yadi Haryadi, dkk, *Pemberdayaan Komite Sekolah Modul 1 Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), h. 5

⁴Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 47

tertentu sesuai kebutuhan yang ada. Selain itu, dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis.⁵

Berikut adalah contoh Struktur Organisasi Komite Sekolah:



Keterangan :

- Garis pemeriksa keuangan
- > Garis pembinaan, koordinasi, kerja sama
- Garis pelaksanaan tugas ⁶

Pengurus komite adalah personal yang ditetapkan oleh dan dari anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite, masa kerja ditetapkan oleh musyawarah komite, dan jika diperlukan pengurus komite dapat

⁵*Ibid.*, h. 100

⁶Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), Cet. Ke-1, h. 28

menunjuk atau dibantu oleh Tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.⁷

Komite sekolah merupakan bagian dari sub sistem di satuan pendidikan yang juga mempunyai peran penting di dalamnya yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam menentukan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran dan tenaga; sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat; serta sebagai pengontrol.

Komite sekolah juga mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan
 - b. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d. Kriteria tenaga kependidikan
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
5. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan⁸

Secara organisatoris, semua lembaga pendidikan perlu memantapkan fungsi dan memberdayakan komite sekolah sebagai wahana penghubung dengan

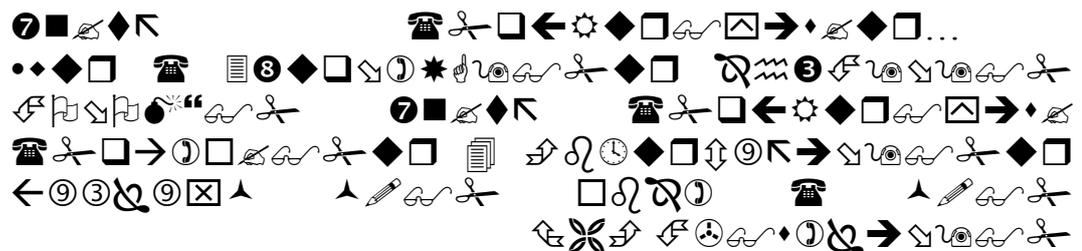
⁷Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Pedoman Komite Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 2003), h. 17

⁸Yadi Haryadi, dkk, *Pemberdayaan Komite Sekolah Modul 1 Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), h. 13-14

masyarakat. Karena dengan keberadaan komite sekolah maka akan dapat mengefektifkan kewenangannya dan komunikasinya dalam meningkatkan keuangan sekolah misalnya berupa SPP/DPP sehingga dengan itu dapat menambah sarana, prasarana baru untuk mendukung pelaksanaan program yang akan dikembangkan oleh setiap lembaga pendidikan.

Oleh karena itu kerja sama antara sekolah dengan para *stakeholder* atas terselenggaranya proses pendidikan merupakan cara yang paling tepat dan efektif untuk membentuk kerjasama masyarakat dalam meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk kerjasama ini merupakan keharusan. Karena, apa yang diinginkan dan diharapkan dari sekolah dan pemerintah akan dapat terpenuhi secara maksimal, jika dilakukan dengan bekerjasama.

Diungkapkan oleh Hasbullah “Pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara murid, orang tua murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai

institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya”.⁹

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa komite sekolah sangat besar perannya dalam pendidikan, guna untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Tetapi konsep komite sekolah itu tidak mudah untuk diaplikasikan karena membutuhkan proses yang bertahap.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana profil dan peran komite SMP Negeri 2 Bati-Bati, karena berdasarkan penajakan awal penulis pada SMP Negeri 2 Bati-Bati ada mempunyai komite sekolah yang beranggotakan 5 pengurus yaitu yang terdiri dari ketua komite, wakil, sekretaris, bendahara dan seksi dana.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini secara khusus dan mendalam. Yang akan dituangkan dalam sebuah bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “PERAN KOMITE SEKOLAH PADA SMP NEGERI 2 BATI-BATI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Profil Komite SMP Negeri 2 Bati-Bati?

Yang dimaksud di sini adalah tentang keadaan komite SMP Negeri 2 Bati-Bati. Yakni tentang struktur organisasi komite sekolah, pembagian tugasnya,

⁹Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 90

sumber daya manusia dan karakteristiknya, sejarah terbentuknya, program dan aktivitasnya, serta kontribusi (sumbangan) komite terhadap sekolah.

2. Bagaimana Peran Komite SMP Negeri 2 Bati-Bati?

Yang dimaksud adalah tentang sejauh mana peran komite sekolah itu dilaksanakan di sekolah tersebut. Peran komite sekolah tersebut yakni sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).

Peran komite tersebut yakni meliputi tentang perannya sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran dan tenaga; sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; dan sebagai mediator (*mediator agency*) antara pemerintah dengan masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profil komite SMP Negeri 2 Bati-Bati yaitu tentang struktur organisasi komite sekolah, pembagian tugasnya, sumber daya manusia dan karakteristiknya, sejarah terbentuknya, program dan aktivitasnya, serta kontribusi (sumbangan) komite terhadap sekolah.
2. Untuk mengetahui peran komite SMP Negeri 2 Bati-Bati dalam menjalankan perannya di sekolah tersebut. Apakah perannya sesuai dengan peran yang telah

ditetapkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang (PROPENAS), yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran dan tenaga; sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat; dan sebagai pengontrol.

D. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis merasa perlu menegaskan beberapa istilah dan lingkup pembahasan yang erat kaitannya dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Profil Komite Sekolah

Kata “ profil “ berarti pandangan dari samping; lukisan (gambar) orang dari samping; grafik yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus; tampang orang atau sosok orang terkenal yang diekspose di media massa.¹⁰ Jadi yang dimaksud di sini adalah gambaran tentang keadaan komite SMP Negeri 2 Bati-Bati yang meliputi struktur organisasinya, pembagian tugas, sumber daya manusia dan karakteristiknya, sejarah terbentuknya, program dan aktivitasnya, serta kontribusi (sumbangan) komite terhadap sekolah.

2. Peran

Kata “ peran “ berarti laku, hal berlaku, bertindak, pelaku, pemain.¹¹ Jadi yang dimaksud penulis di sini adalah meneliti sejauh mana tindakan atau kinerja

¹⁰Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), Cet-1, h. 549

¹¹Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 585

yang dilakukan oleh komite SMP Negeri 2 Bati-Bati selaku sub sistem pendidikan.

3. Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.¹² Jadi yang dimaksud penulis di sini adalah komite atau badan sekolah yang ikut serta dalam pengelolaan pendidikan pada SMP Negeri 2 Bati-Bati.

Yang dimaksud peran komite sekolah adalah tindakan atau kinerja suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat, dan juga yang merupakan sub sistem pendidikan dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

E. Signifikansi Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dibuat, diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai:

1. Bahan informasi dan sumbangan penelitian bagi lembaga pendidikan terhadap peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.
2. Bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang serupa untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam

¹²Hasbullah, *Otonomi Pendidikan, Op. Cit., h. 47*

tentang pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan

3. Menambah wawasan dan pendalaman penulis khususnya yang berkenaan dengan peran komite sekolah.
4. Menambah wawasan dan pendalaman penulis khususnya yang berkenaan dengan peran komite.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan lingkup pembahasan, signifikansi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka tentang komite sekolah yang terdiri dari pengertian komite sekolah, tugas peran dan fungsi komite sekolah, peran komite sekolah sebagai sub sistem di satuan pendidikan/sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi peran komite sekolah

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, metode penelitian, objek penelitian, subjek penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, profil dan peran komite SMP Negeri 2 Bati-Bati.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran

